

**STUDI TENTANG PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH DI KELURAHAN BONTANG LESTARI  
KECAMATAN BONTANG SELATAN  
KOTABONTANG**

**Riza Trisilawati<sup>1</sup>**

**eJournal Administrasi Negara  
Volume 1, Nomor 2, 2013**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: trisilawatiriza@yahoo.co.id

**STUDI TENTANG PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH DI KELURAHAN BONTANG LESTARI  
KECAMATAN BONTANG SELATAN  
KOTABONTANG**

**Riza Trisilawati<sup>1</sup>**

*Artikel ini menggambarkan tentang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dimana indikator permasalahannya ialah kurangnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah di Kelurahan, sehingga perencanaan pembangunan daerah tersebut belum berjalan dengan baik, kurangnya peran serta masyarakat dalam memecahkan permasalahan `sehari-hari, yaitu tidak adanya penerangan seperti lampu jalanan yang dapat menerangi jalan pada malam hari. Artikel ini berargumentasi bahwa peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dapat dikatakan belum dapat menjalankan perannya dengan baik di karenakan kurangnya keikut sertaan pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan di daerahnya. Data yang dipresentasikan dalam tulisan ini bersumber dari hasil penelitian lapangan selama 30 hari yang berlokasi di Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.*

**Kata Kunci:** *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Perencanaan Pembangunan Dearah*

**Pendahuluan**

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang merata khususnya di tingkat desa atau lurah diperlukan peningkatan prakarsa dan peran masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan. Karena pembangunan tidak semata-mata menjadi tugas pemerintah saja melainkan menjadi tugas dan tanggung jawab dari masyarakat bahkan keberhasilan pembangunan tergantung dari peran masyarakat baik secara fisik maupun moril.

Dan pada setiap kegiatan perencanaan pembangunan yang bersifat daerah itu perlu adanya suatu lembaga pemerintahan yang dapat mengkoordinasikan masyarakat agar dapat bersama-sama maupun bekerjasama secara partisipatif. Lembaga pemerintah daerah tersebut harus menjadi lembaga yang dapat menampung aspirasi masyarakat salah satunya adalah Lembaga Pemberdayaan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: trisilawatiriza@yahoo.co.id

Mayarakat (LPM) yang berada ditingkat kelurahan. Aspirasi mayarakat tersebut selanjutnya disampaikan kepada pihak kelurahan sebagai bahan kajian pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan diwilayah kelurahan tersebut. Pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat akan membawa dampak pada keharmonisan hubungan pemerintah dengan masyarakat. Adapun permasalahan yang timbul dari hasil pengamatan penulis di Kelurahan tersebut yaitu: kurangnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah di Kelurahan, sehingga perencanaan pembangunan daerah tersebut belum berjalan dengan baik, kurangnya peran serta masyarakat dalam memecahkan permasalahan sehari-hari, yaitu tidak adanya penerangan seperti lampu jalanan yang dapat menerangi jalan pada malam hari berdasarkan uraian di atas dan permasalahan yang ada maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Studi Tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang”.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Lembaga dan Organisasi***

Horton dalam Nurcholis (2005:117) mengatakan bahwa lembaga adalah suatu sistem norma yang dipakai untuk mencapai tujuan yang dirasa penting, atau kumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang terorganisir yang terpusat dalam kegiatan utama manusia (*system a norms to achieve some goal or activity that people feel is important or more formally, an organized cluster of folkways and mores centered around a major human activity*). Jadi, lembaga itu berupa norma-norma yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Norma-norma itu berupa kebiasaan (*folways*) dan tata kelakuan (*mores*).

### ***Pemberdayaan Masyarakat***

Menurut Suharto (2005 : 59) pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

### ***Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat***

#### ***Peran***

Menurut Suhardono (1994:15) peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan seseorang, yang menduduki suatu posisi. Selanjutnya menurut Soekanto (2002:234) peran adalah bagian yang di mainkan seseorang atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan atau peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status).

Menurut Makmuri Muchlas (2005:251) peran di dedifisikan sebagi corak perilaku yang di diharapkan yang seharusnya dimiliki oleh seseorang yang menduduki salah satu posisi didalam sebuah unit sosial.

### ***Lembaga Pemberdayaan Masyarakat***

Sebelum disebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dulunya disebut Lembaga Ketahanan Masyarakat (LKMD). Menurut keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2001 tentang Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain yang disebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat yang merupakan sebuah wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakat, yang meliputi aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, dan ketertiban keamanan.

Diuraikan kembali dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Rukun Tetangga dalam daerah kota Bontang (Lembaran Daerah Kota Bontang No.13), bahwa LPM mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif
2. Mengarahkan swadaya gotong royong masyarakat
3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Disamping itu dalam melaksanakan tugasnya LPM juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat kelurahan
2. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan
3. Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan
4. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu
5. Pengendalian dan pemanfaatan sumber dana kelembagaan untuk pembangunan kelurahan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu lembaga independen sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah.

### ***Perencanaan Pembangunan***

Menurut Afiffudin (2010:87) perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Maka perencanaan pembangunan pada umumnya harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan beberapa unsur pokok, yaitu:

1. Tujuan akhir yang ingin dicapai
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk merealisasikan tujuan akhir
3. Jangka waktu yang diperlukan dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut
4. Masalah-masalah yang dihadapi
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan, serta pengalokasiannya.
6. Kebijakan-kebijaksanaan untuk merealisasikannya
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksanaannya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan.

Menurut Riyadi & Dedy Supriady (2005:7) Perencanaan pembangunan adalah suatu proses alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan

pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/ aktifitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik, maupun non fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

### ***Pembangunan Daerah***

Menurut Kunarjo (2002:111) pembangunan daerah merupakan semua kegiatan pembangunan baik yang termasuk maupun yang tidak termasuk urusan rumah tangga daerah yang meliputi berbagai sumber pembiayaan, baik yang berasal dari pemerintah (APBD dan APBN) dan yang bersumber dari masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pembangunan daerah, secara umum pembangunan daerah bertujuan:

1. Memanfaatkan potensi yang ada di setiap daerah untuk pengembangan daerah yang bersangkutan.
2. Mengusahakan agar daerah-daerah yang relatif masih terbelakang dapat berkembang dengan laju yang lebih cepat dari pada daerah lainnya sehingga dapat dikurangi kesenjangan dalam kemajuan dan pendapatan antar daerah sehingga tercapai pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya secara regional.
3. Mengusahakan agar peran daerah yang relatif terbelakang bertambah bertambah besar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial.

Menurut Iwan Nugroho & Rochmin Dahuri (2004:193) pembangunan daerah merupakan bagian integral dan sebagai penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan daerah. Pembangunan daerah mencakup semua kegiatan pembangunan daerah dan sektoral yang berlangsung di daerah, yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu pemilihan sekelompok subyek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dalam hal ini penulis memilih Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai informan kunci (*key informan*) dan metode teknik snow ball sampling yaitu mencari informasi dari masyarakat yang berada di sekitar Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan sehingga diharapkan akan mendapatkan data yang valid dan lengkap, dimana data primer diperoleh dari *key informan* dan informan, dan data sekunder diperoleh dari data-data Kelurahan Bontang Lestari yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Sedangkan analisis data yang digunakan ialah analisis data Miles Huberman yaitu pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

***Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Menampung Dan Mengolah Aspirasi Dan Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan.***

Dari salah satu peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu dengan menampung dan juga mengolah aspirasi dan partisipasi di bidang pembangunan dalam arti bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) melakukan kegiatan menerima setiap aspirasi masyarakat yang datang dengan maksud bahwa LPM bertindak sebagai wadah atau tempat bagi masyarakat untuk melapor atau memberikan usulan yang berkaitan dengan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan. Dan setelah dilakukannya penelitian, peneliti juga memaparkan hasil wawancara oleh beberapa sumber-sumber terkait, diantaranya adalah Bapak Mursyid Musiran selaku Ketua LPM Kelurahan Bontang Lestari:

“Masyarakat kini sudah mulai aktif dalam memberikan partisipasinya dalam bentuk usulan-usulan yang berkaitan dengan pembangunan daerahnya, sesuai dengan apa yang di butuhkan masyarakat sekitar”. (wawancara, 11 Februari 2013)

***Menyusun Perencanaan Pembangunan Kelurahan Dengan Sistem Skala Prioritas.***

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Bontang Lestari merupakan lembaga independen mitra pemerintah kelurahan yang diharapkan mampu berperan serta dengan berpartisipasi dalam rangka memberdayakan masyarakatnya melalui perencanaan-perencanaan yang akan dilaksanakan. Maka penulis juga menyajikan beberapa hasil wawancara yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah sesuai hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Mursyid Musiran selaku Ketua LPM Kelurahan Bontang Lestari beliau mengatakan sebagai berikut :

“Menyusun perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama oleh beberapa pihak diantaranya adalah perwakilan-perwakilan dari pihak kelurahan, lembaga-lembaga yang berada di Kelurahan Bontang Lestari beserta perwakilan masyarakat sekitar daerah tersebut”. (wawancara, 11 Februari 2013)

***Melaksanakan Dan Mengendalikan Pembangunan.***

Pada tahap melaksanakan dan mengendalikan pembangunan ini juga sangat memperhatikan proses skala prioritas karena kegiatan pembangunan yang harus diutamakan dan juga mendapatkan dukungan oleh masyarakat agar didalam melaksanakan proses pembangunan tersebut dapat berjalan dengan optimal.

Mengenai pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrembang) ditingkat Kelurahan yang diadakan oleh Kelurahan Bontang Lestari sebagai salah satu wadah/ tempat penyalur aspirasi masyarakat maka penulis juga melakukan wawancara kepada ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Bapak Mursyid Musiran yang memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Pelaksanaan dan pengendalian pembangunan memang dianggap tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan di sebabkan permasalahan intern di dalam dalam tubuh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat itu sendiri seperti tidak adanya kerja sama yang baik antar anggota yang berada dalam kelembagaan tersebut“. (wawancara, 11 Februari 2013)

***Membina Kerja Sama Antar Lembaga Yang Ada Di Kelurahan. Sesuai Dengan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Tersebut Mulai Dari Musrenbang RT Sampai Tingkat Musrenbang Kelurahan.***

Dari hasil wawancara penelitian mengenai membina kerjasama antar lembaga yang ada di Kelurahan pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) ditingkat Kelurahan, maka ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Bapak Mursyid Musiran yang memberikan penjelasan sebagai berikut :

**“Tidak dapat dipungkiri bahwasannya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini tidak mampu membina kerjasama yang baik antar lembaga lebih lama lagi karena alasan yang sama seperti yang telah disebutkan pada point-point diatas“. (wawancara, 11 Februari 2013)**

***Pelaksanaan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam hal: Menampung dan Mengolah Aspirasi dan Partisipasi di Bidang Pembangunan***

Dalam tahap menampung dan mengolah aspirasi dan partisipasi di bidang pembangunan inilah yang dapat peneliti sajikan yang isinya sesuai hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Mursyid Musiran selaku Ketua LPM Kelurahan Bontang Lestari beliau mengatakan sebagai berikut :

“Aspirasi/usulannya masyarakat itu bermacam-macam, contohnya seperti usulan pembangunan yang berkaitan dengan fasilitas umum (fisik), peningkatan ekonomi keluarga menengah atau keluarga miskin dan sebagainya. Semuanya itu ditampung terlebih dahulu kemudian dipilih dan disampaikan melalui musrenbang perencanaan pembangunan daerah“. (wawancara, 11 Februari 2013)

***Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kelurahan Dengan Sistem Skala Prioritas***

Mengenai pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) ditingkat Kelurahan yang diadakan oleh Kelurahan Bontang Lestari sebagai salah satu wadah/ tempat penyalur aspirasi masyarakat maka ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Bapak Mursyid Musiran yang memberikan penjelasan sebagai berikut :

“ Musrenbang kelurahan dilaksanakan dengan memperhatikan rembug warga dan hasil pra musrenbang Kelurahan serta masukan-masukan yang

menggambarkan permasalahan yang sedang dihadapi warga masyarakat yang berada disekitar Kelurahan Bontang Lestari dan daftar yang disusun berdasarkan prioritas permasalahan hasil rebug warga dari setiap RT “. (wawancara, 11 Februari 2013)

***Melaksanakan dan Mengendalikan Pembangunan.***

Untuk mengetahui peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada tahap melaksanakan dan mengendalikan pembangunan penulis kemudian melakukan wawancara kepada Bapak Mursyid Musiran selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Bontang Lestari :

“Belum ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak LPM dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan di karenakan kelembagaan ini sudah tidak memiliki kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan daerah jadi pihak LPM tidak dapat memberikan peranan dalam proses kegiatan perencanaan pembangunan dan semua kegiatan perencanaan pembangunan tersebut kemudian dilaksanakan dibawah pengawasan pihak Kelurahan Bontang Lestari. ”.(wawancara, 11 Februari 2013)

***Membina Kerja Sama Antar Lembaga Yang Ada Di Kelurahan. Sesuai Dengan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Tersebut Mulai Dari Musrenbang RT Sampai Tingkat Musrenbang Kelurahan.***

Mengenai upaya-upaya yang belum nampak dilakukan oleh pihak kelurahan dalam hal ini adalah Lemabaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yaitu untuk dapat saling bekerjasama dengan masyarakat dan lembaga yang ada dikelurahan, sesuai dengan proses perencanaan pembangunan itu sendiri mulai dari Musrenbang RT sampai tingkat Musrenbang Kelurahan. Dan penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mursyid Musiran selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Bontang Lestari :

“Memang perlu adanya kerjasama antar lembaga terkait yang berada di kelurahan guna dapat saling bersama-sama memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat, dan dalam hal ini memang kami pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memang belum dapat bisa bekerja sama dikarenakan tidak memiliki kegiatan-kegiatan penunjang perencanaan pembangunan maka belum terlihat bentuk kerjasama yang baik dari kami pihak LPM dengan Lembaga-lembaga lain di Kelurahan Bontang Lestari ini.”. (wawancara, 11 February 2013)

***Faktor Pendukung Maupun Kendala/Hambatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.  
Tidak Adanya Faktor Pendukung Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan***

Dalam perencanaan pembangunan daerah yang di laksanakan oleh Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang penelitipun tidak mendapatkan hasilnya dalam faktor pendukung dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerahnya. Di karenakan Lembaga



tersebut tidak dapat menjalankan perannya dengan baik dan seharusnya. Dari situlah peneliti tidak mendapatkan hasil dalam faktor pendukung LPM dalam perencanaan pembangunan daerahnya.

### ***Terbatasnya Anggaran Dana yang Dialokasikan Untuk Kegiatan Pembangunan***

Dalam peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), baik partisipasi masyarakat maupun pemerintah dan juga pihak swasta sangat dibutuhkan untuk membantu terlaksananya kegiatan pembangunan. Hambatan dalam peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang telah dilakukan di Kelurahan Bontang Lestari, berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Mursyid Musiran selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Bontang Lestari :

“Adapun yang menjadi kendala dalam peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan yaitu terbatasnya dana yang tersedia untuk dialokasikan baik untuk program pengentasan kemiskinan maupun pada program kegiatan pembangunan fisik maupun ekonomi, keterbatasan danapun menjadi salah satu kendala dalam hal ini”.(wawancara, 11 February 2013)

### ***Kurangnya Peran Aktif Dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kelurahan Bontang Lestari Tersebut***

Pada dasarnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah suatu wadah atau tempat bagi masyarakat yang ingin memberikan sumbangan baik dana maupun pikirannya dalam perencanaan pembangunan daerah. Di bawah naungan pihak Kelurahan seharusnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dapat ikut memberikan peran aktifnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah secara langsung dan dapat diikuti oleh semua golongan masyarakat. Dalam hal ini tugas dan fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memang belum dapat dilihat dan dirasakan nyata dalam perencanaan pembangunan daerah di Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.

Hal tersebut tidak luput dari kendala ataupun penghambat yang timbul dari pihak LPM itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mursyid Musiran selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Bontang Lestari :

“Yang menjadi suatu hambatan bagi LPM tidak dapat melakukan perannya dalam perencanaan pembangunan daerah adalah karena kurangnya koordinasi antara anggota LPM itu sendiri maka menjadikan LPM tersebut tidak bisa menjalankan perannya dengan baik”. (wawancara, 10 February 2013)

### ***Penutup***

Berdasarkan analisis data secara deskripsi di atas tentang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan

Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan bahwa peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Bontang Lestari dari dimensi bukti langsung (*tangibles*) dapat dikatakankurang dapat menjalankan perannya sesuai dengan yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Dalam hal menampung dan mengolah aspirasi dan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan, Menyusun perencanaan pembangunan kelurahan dengan sistem skala prioritas, Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, Membina kerja sama antar lembaga yang ada di kelurahan. Sesuai dengan proses perencanaan pembangunan daerah tersebut mulai dari Musrenbang RT sampai tingkat Musrenbang Kelurahan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tidak memiliki peran langsung di dalamnya Hal ini didasari oleh pengamatan dan penelitian penulis di lapangan yang dilakukan secara langsung untuk mendapatkan hasil yang baik dalam hal penulisan.

Faktor pendukung dan pengahambat atau kendala lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu: tidak adanya faktor pendukung dari pihak LPM yang menyebabkan pihak Lembaga tersebut kurang dapat bekerja sama dengan baik dengan masyarakat maupun lembaga-lembaga yang berada di pemerintahan Kelurahan, terbatasnya anggaran dana yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan. Kesimpulan yang penulis dapat simpulkan ialah terbatasnya anggaran dana bukanlah alasan bagi pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk tidak menjalankan tugasnya dengan baik karena pendanaan untuk kegiatan perencanaan pembangunan daerah itu sendiri tidak hanya datang dari sumber APBD saja tetapi bisa juga datang dari pendanaan-pendanaan lain yang datangnya dari sumbangan warga masyarakat sekitar daerah tersebut, kurangnya peran aktif dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Kelurahan Bontang Lestari tersebut. Kurangnya peran aktif dari LPM Bontang Lestari dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik karena kurangnya kesadaran dari pihak LPM tersebut akan pentingnya peran yang seharusnya menjadikan pihak LPM menjadi Lembaga yang dapat ikut berperan dan berpartisipasi langsung dalam perencanaan pembangunan daerahnya.

Setelah peneneliti melalui beberapa macam tahapan-tahapan penelitian dalam peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah di Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, maka penulis memberikan saran-saran kepada beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini, adapun saran yang penulis perlu kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Karena tidak adanya faktor pendukung dari LPM dalam perencanaan pembangunan tersebut yang mengakibatkan tidak adanya kerja sama yang baik maka sebaiknya semua pihak dapat ikut turun serta memberikan dukungannya kepada pihak Lembaga tersebut agar dapat memberikan

- sumbangannya dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Kelurahan Bontang Lestari.
2. Terbatasnya anggaran dana yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunandan penulis dapat memberikan saran yaitu dengan cara mencari pendanaan lain diluar dari pendanaan yang telah dialokasikan pemerintah untuk daerah tersebut misanyalnya dari masyarakat sekitar Kelurahan tersebut ataupun pendanaan yang datangnyadari sumbangan–sumbangan lain diluar APBDyang telah di tetapkan pemerintah Kota Bontang.
  3. Kurangnya peran aktif dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Kelurahan Bontang Lestari tersebut. Saran yang dapat penulis berikan ialah karena permasalahan ada di dalam kepengurusan LPM maka perlu adanya koordinasi yang baik antar keanggotaan yang berada dalam suatu lembaga yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat khususnya agar dapat tercapainya suatu tugas dan fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat itu sendiri. Karena koordinasi yang baik merupakan suatu faktor penting dalam menjalin sebuah kelembagaan. Dan sebaiknya pihak Kelurahan Bontang Lestari juga dapat ikut turun serta dalam menengahi.

#### **Daftar Pustaka**

- Afiffudin, 2010, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Alfabeta. Bandung.
- Kunarjo, 1982. *Percanaan dan Pembiayaan Pembangunan*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah.*, PT.Grasindo, Jakarta
- Riyadi, & Deddy Supriady Bratakusumah, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Suhardono, Edy, 1994. *Teori Peran Konsep, Perivasi dan Implikasinya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suharto, Edi, 2005. *Membangun Masyarakat dan Mendayagunakan Rakyat*. Refika Aditama. Bandung.

#### **Dokumen**

- Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 *Tentang Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa*.
- Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2003 *Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Rukun Tetangga Dalam Daerah Kota Bontang*.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 *Tentang Pembangunan Daerah*